

TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI POLA KONSUMSI

Suwarda^{1*)}

¹⁾ Program Studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Data Artikel : Naskah masuk, 26 Juni 2023 Direvisi, 15 Juli 2023 Diterima, 17 Juli 2023 *Email Korespondensi: suwarda@widyagama.ac.id	Kesejahteraan masyarakat di suatu tempat secara ekonomi ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Berhubungan dengan penggunaan atau pola konsumsi, tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh pola konsumsi bahan pangan dan bahan bukan pangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola konsumsi bahan pangan dan bahan bukan makanan hubungannya dengan tingkat kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan metode survey terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pola konsumsi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Pedesaan DIY tingkat kesejahtraannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Perkotaan DIY tingkat kesejahtraannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Pedesaan pada tahun 2011 - 2020, tingkat kesejahtraannya di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Perkotaan pada tahun 2011 - 2020, tingkat kesejahtraannya di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Pada tahun 2021 di Pedesaan DIY, tingkat kesejahtraannya menduduki nomor lima tingkat Nasional. Kata Kunci : Kesejahteraan, Pendapatan, Konsumsi, Makanan, Bukan makanan

1. PENDAHULUAN

Hal yang paling penting dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan, karena beberapa aspek dari tingkat kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibatasi oleh tingkat pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi besarnya pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk mengkonsumsi bahan pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut adalah sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut dapat merubah pola konsumsi rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera atau belum sejahtera.

Pada dasarnya tingkat kesejahtraan masyarakat secara ekonomi ditentukan tingkat pendapatan, dan banyak pendapat yang mendukungnya. Menurut Ida Bagus Eka Artika dan Ida Ayu Ketut Marini (2023), peningkatan pendapatan rumah tangga, cenderung merubah pola konsumsi untuk pangan dan non pangan. Sesuai pendapat Engel, ketika pendapatan meningkat maka proporsi untuk pengeluaran pangan akan menurun, walaupun secara absolut jumlahnya meningkat. Lidya Anggalisa, Lidya dan Marwan (2023), mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Achmad Dzaky Arrosyid, Pandi Pardian (2022), pola konsumsi dipengaruhi oleh beberapa variabel karakteristik responden yaitu pendapatan, pekerjaan, umur, pendidikan dan jumlah anggota keluarga. Dewi

Mayasaria, Dias Satriaa dan Iswan Noora (2018), mengatakan bahwa komoditas pangan di Jawa Timur bersifat inelastis terhadap harga dan lebih responsif terhadap perubahan pendapatan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang dilakukan atas barang dan jasa oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhannya di periode tertentu. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan kesejahteraan rumah tangga tersebut yang dilihat dari pola konsumsinya. Pola konsumsi ini dilihat berdasarkan alokasi penggunaannya yang digolongkan atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. (Lidya Anggalisa dan Marwan, 2023).

Tingkat pengeluaran rumah tangga akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada golongan tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, status sosial, harga pangan, proses distribusi, dan prinsip pangan. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan beberapa indikator kesejahteraan, yaitu meliputi kependudukan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, konsumsi, perumahan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya.

Pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah tertentu. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi bahan non makanan, begitupun sebaliknya. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari bahan makanan ke bahan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk mengkonsumsi bahan bukan makanan.

Salah satu ukuran ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah secara kuantitatif adalah tingkat pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahtraannya semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan yang diterima sebuah rumah tangga menunjukkan tingkat kesejahtraannya yang semakin memburuk. Namun demikian, dalam operasionalnya di lapangan, untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga tidak mudah. Kesadaran dan keterbukaan rumah tangga selaku responden untuk memberikan informasi yang mengarah diperolehnya data pendapatan yang sebenarnya masih kurang. Akibatnya, data pendapatan rumah tangga sering jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, untuk menghitung pendapatan rumah tangga digunakan pendekatan jumlah pengeluaran atau konsumsi (*consumption approach*) untuk mengukur taraf pendapatan sebuah rumah tangga (BPS DIY, 2020). Fourtheria Munidestari, Djaimi Bakce, Novian (2022), menemukan bahwa pola konsumsi pangan padi-padian dan umbi-umbian berdasarkan pendapatan, semakin tinggi pendapatan pangsa pengeluaran komoditi beras, tepung terigu, dan singkong di Provinsi Riau semakin menurun. Farhan Baihakki, Muhammad Anwar Fathoni (2023), pendapatan berpengaruh positif terhadap pola konsumsi pangan dan non pangan. Selvi, Moh. Mudassir, Ali, Trisna (2023), menemukan bahwa pendapatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan keluarga petani padi di desa marisa kecamatan basidondo kabupaten Tolitoli. Sri Handayani dan Herry Yulistiyo (2023), menemukan bahwa secara parsial, variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Banyuwangi. Amalia Septiyani (2022), menemukan bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga yaitu jumlah belanja per bulan, dummy golongan pendapatan sedang, dan dummy golongan pendapatan tinggi. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga yaitu pendapatan rumah tangga, umur, pendidikan ibu rumah tangga, dan jumlah anggota keluarga.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu pemenuhan atas kebutuhan pangan yang cukup, bergizi dan aman menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, dalam rangka untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, yang selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan pangan merupakan penjumlahan dari kebutuhan pangan untuk dikonsumsi secara langsung, untuk memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan untuk permintaan lainnya. Konsumsi langsung adalah jumlah pangan yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat (BPS DIY, 2020).

Konsumsi rumah tangga atau penduduk menjadi salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Indikator turunannya adalah konsumsi perkapita penduduk beserta polanya, konsumsi kalori, dan protein. Perbandingan tingkat konsumsi perkapita penduduk antar wilayah menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah tersebut. Demikian pula pertumbuhan konsumsi perkapita antar waktu, akan menggambarkan adanya peningkatan atau penurunan kesejahteraan penduduk. Pola konsumsi penduduk sangat rentan dipengaruhi oleh faktor tingkat harga relatif, perubahan harga (inflasi/deflasi) dari komoditas yang dikonsumsi, faktor sosial budaya, dan perilaku lingkungan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat. Indikator pola konsumsi dapat diukur menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk komoditas makanan dan non makanan (BPS DIY, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pola konsumsi penduduk DIY secara keseluruhan, dan dibedakan antara pedesaan dengan perkotaan. Terdiri dari pola konsumsi bahan makanan dan bahan bukan makanan.

Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah tentang pola konsumsi di DIY. Pola konsumsi yang dimaksud terdiri dari pola konsumsi:

- a. Pola konsumsi makanan.
- b. Pola konsumsi bukan makanan.

Alat analisis menggunakan system tabel silang. Tempat penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan cara tabulasi, yaitu mengambil data yang telah tersedia di BPS.

Definisi operasional variabel penelitian:

- a. Pola konsumsi bahan makanan, adalah prosentase pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari bahan makanan secara keseluruhan, meliputi bahan makanan pokok dan makanan bukan pokok, dalam satuan persen (%)
- b. Pola konsumsi bahan non makanan, adalah prosentase pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari bahan bukan makanan secara keseluruhan, masing-masing dengan satuan persen (%).
- c. Teknik analisis data dengan menggunakan table silang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik/gambar, dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

1. Pola konsumsi untuk Makanan dan non Makanan

Di atas telah disebutkan bahwa apabila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk bahan makanan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah pendapatan. Hal ini dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021 disebutkan bahwa berdasarkan data SUSENAS, pengeluaran penduduk Indonesia per bulan untuk bahan makanan dan bukan makanan selama tahun 2011 - 2020 menunjukkan adanya fluktuasi pergeseran. Pada awalnya persentase pengeluaran untuk bahan makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran bahan bukan makanan, namun di tahun 2011 dan 2015 - 2020 kecuali tahun 2017 persentase pengeluaran untuk bahan bukan makanan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk bahan makanan. Persentase pengeluaran per bulan pada tahun 2011 untuk bahan makanan sebesar 49,45% dan untuk bahan bukan makanan sebesar 50,55%. Untuk tahun 2011, dan tahun 2015-2020, kecuali tahun 2017 persentase untuk bahan bukan makanan menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk bahan makanan. Tahun 2020 persentase tersebut menjadi sebesar 49,22% untuk pengeluaran bahan makanan dan 50,78% untuk pengeluaran bukan makanan (table 1).

Pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan tahun 2020 sebagian besar dialokasikan untuk makanan dan minuman jadi mencapai 34,27%, disusul rokok sebesar 12,17%, padi-padian 11,07%, ikan 7,72%, sayur-sayuran sebesar 7,52%, telur dan susu sebesar 5,78%, sementara kelompok makanan lainnya kurang dari 5%. Pola pengeluaran penduduk Indonesia untuk bahan makanan selama 2 tahun terakhir terlihat mengalami perubahan, yaitu untuk makanan jadi menurun menjadi 34,27% di tahun 2020. Demikian juga pengeluaran untuk rokok dan tembakau menurun dari sebelumnya 12,32%. Persentase pengeluaran untuk rokok di tahun 2020 ini lebih tinggi dari pengeluaran untuk jenis makanan yang lain bahkan padi-padian. Pengeluaran untuk sayur, buah serta telur mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran untuk padi-padian terlihat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pola konsumsi masyarakat Indonesia nampak bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dari tahun 2011 ke tahun 2012 menurun, dengan pola konsumsi bukan makanan 50,55 persen menjadi 48,92 persen, dan penurunannya sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 meningkat kembali, tahun 2017 menurun dan meningkat kembali sampai tahun 2020.

Tabel 1. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia

No.	Tahun	Makanan	Bukan Makanan
1	2011	49,45	50,55
2	2012	51,08	48,92
3	2013	50,66	49,34
4	2014	50,04	49,06
5	2015	47,47	52,53
6	2016	48,08	51,92
7	2017	50,94	49,06
8	2018	49,51	50,49
9	2019	49,14	50,86
10	2020	49,22	50,78

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Pada Tabel 1 nampak bahwa pada tahun 2020, di Indonesia pola konsumsi untuk bahan makanan 49,22 persen dan untuk konsumsi bukan bahan makanan 50,78 persen. Sementara itu di Jakarta pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan 41,84 persen dan konsumsi untuk bahan non makanan 58,16 persen. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk konsumsi bahan makanan 41,03 persen dan untuk bahan non makanan 58,97 persen. Dari tiga kawasan atau lingkup yang berbeda dalam satu negara tersebut, nampak bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai tingkat kesejahteraan paling tinggi, dibanding dengan kawasan Indonesia secara menyeluruh dan di Jakarta. Sementara itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, untuk konsumsi makanan dan bukan makanan masing-masing adalah 49 persen dan 51 persen, 48,72 persen dan 51,28 persen. Nampak bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur tingkat kesejahteraannya lebih rendah dibanding dengan tingkat kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021).

Wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi dua kawasan, yaitu perdesaan dan perkotaan. Masing-masing wilayah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri yang erat sekali dengan lingkungan masing-masing. Masyarakat Perdesaan atau masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama, yaitu sesuatu aturan yang sudah mantab dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Tidak demikian halnya apabila dibanding dengan masyarakat perkotaan.

Ditinjau dari perekonomian, masyarakat di Perkotaan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi lebih cepat atau lebih sejahtera dibanding dengan masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya didominasi oleh sektor pertanian sebagai mata pencaharian pokoknya. Dengan demikian masyarakat perkotaan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Tabel 2 dan Tabel 3 berikut memberi gambaran perbedaan antara masyarakat Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 2. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia Di Perdesaan Untuk Makanan dan Non Makanan, 2021

No.	Propinsi	Makanan	Bukan Makanan
1	Bali	49,45	50,55
2	Kalimantan Timur	51,08	48,92
3	Gorontalo	50,66	49,34
4	Sulawesi Tenggara	50,04	49,06
5	DIY	47,47	52,53
6	Maluku Utara	48,08	51,92
7	Sulawesi Tengah	50,94	49,06
8	Papua Barat	49,51	50,49
9	Kalimantan Utara	49,14	50,86
10	Jawa Tengah	49,22	50,78
	Indonesia	56,20	43,80

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Sementara itu nampak bahwa (Tabel 2), di pedesaan Indonesia untuk bahan makanan 56,20 persen dan untuk bahan non makanan 43,80 persen. Di DIY pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan 47,47 persen dan konsumsi untuk bahan non makanan 52,53 persen. Sedangkan

di Jawa Tengah, untuk konsumsi makanan dan bukan makanan masing-masing adalah 49,22 persen dan 50,78 persen.

Sebaliknya, pola konsumsi penduduk Indonesia di daerah perkotaan dari tahun 2011 hingga 2020 (Tabel 3) apabila dibandingkan dengan konsumsi untuk makanan lebih rendah dari 50 persen selama enam tahun, sebaliknya pengeluaran untuk bahan bukan makanan mengalami peningkatan, sebagian besar lebih besar dari 50 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di perkotaan tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dari pada masyarakat di perdesaan.

Selain itu, pada table 3 nampak bahwa pola konsumsi untuk bahan makanan di perkotaan DIY lebih rendah apabila dibandingkan dengan di perkotaan Indonesia. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan di DIY lebih tinggi dibanding dengan masyarakat perkotaan di Indonesia.

Tabel 3. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia Di Perkotaan Untuk Makanan dan Non Makanan, 2021

No.	Propinsi	Makanan	Bukan Makanan
1	Jakarta	39,54	60,46
2	DIY	40,00	60,00
3	Kalimantan Timur	40,61	59,39
4	Bali	40,93	59,07
5	Gorontalo	42,63	57,37
6	Sulawesi Tenggara	42,92	57,08
7	Sulawesi Tengah	43,09	56,91
8	Sulawesi Barat	43,98	56,91
9	Kepulauan Riau	44,11	55,89
10	Papua Barat	44,20	55,80
	Indonesia	45,81	54,19

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Sebaliknya, pola konsumsi penduduk Indonesia di daerah perkotaan dari tahun 2011 hingga 2020 (Tabel 3) apabila dibandingkan dengan konsumsi untuk bahan makanan lebih rendah dari 50 persen selama enam tahun, sebaliknya pengeluaran untuk bahan bukan makanan mengalami peningkatan, sebagian besar lebih besar dari 50 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di Perkotaan lebih tinggi dari pada masyarakat di perdesaan.

Selain itu, pada tabel 3 nampak bahwa pola konsumsi untuk bahan makanan di DIY perkotaan lebih rendah apabila dibandingkan dengan di perkotaan Indonesia. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan di DIY lebih tinggi dibanding dengan masyarakat perkotaan di Indonesia.

Pada tabel 3 nampak bahwa di perkotaan paling sejahtera adalah DKI, dengan pola konsumsi makanan 39,54 persen dan bukan makanan 60,46 persen. Apabila dilihat dari masing-masing kawasan, yaitu dibedakan antara perdesaan dan perkotaan maka dapat dilihat perbedaannya sebagai berikut (Tabel 2 dan Tabel 3). Dari table 2 nampak bahwa pola konsumsi di Perdesaan kecuali di Bali dan Kalimantan Timur, untuk konsumsi bahan makanan dari tahun 2011 sampai tahun 2020 lebih besar dari 50 persen, artinya sebagian besar pengeluaran dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Selain itu, kenyataan dari data tersebut

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan di perkotaan di Indonesia adalah rendah. Apabila dibandingkan dengan keadaan di DIY, menunjukkan bahwa di DIY lebih sejahtera dibanding dengan di Indonesia. Di pedesaan DIY pola konsumsi makanan 51,73 persen dan untuk bahan bukan makanan 48,27 persen, di Indonesia untuk makanan 56,20 persen dan bukan bahan makanan 53,80 persen. Sedangkan di perkotaan DIY, konsumsi bahan makanan 40 persen dan untuk bahan bukan makanan 60 persen, di Indonesia konsumsi makanan 45,81 persen dan konsumsi bukan makanan 54,19 persen.

Tabel 4. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia dan DIY di Pedesaan Untuk Makanan dan Non Makanan, 2011 - 2020.

No.	Tahun	Daerah Istimewa Yogyakarta		Indonesia	
		Makanan (%)	Bukan Makanan (%)	Makanan (%)	Bukan Makanan (%)
1	2011	47,43	52,57	58,00	42,00
2	2012	51,91	48,09	59,01	40,99
3	2013	53,75	46,25	59,18	40,82
4	2014	59,00	41,00	58,81	41,19
5	2015	52,22	47,78	55,63	44,37
6	2016	50,08	49,92	55,83	44,17
7	2017	54,19	45,81	58,66	41,34
8	2018	49,84	50,16	56,28	43,72
9	2019	51,03	48,97	55,59	44,41
10	2020	50,14	49,86	55,49	44,51

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Dari tabel 4, nampak bahwa selama 10 tahun (2011 - 2020) di DIY tingkat kesejahteraan paling tinggi adalah tahun 2011 dengan pola konsumsi makanan 47,43 persen dan pola konsumsi bukan makanan 52,57 persen. Sedangkan untuk Indonesia, pola konsumsi makanan 58,00 persen dan untuk pola konsumsi bukan makanan 42 persen. Dari tahun 2011 sampai tahun 2020, nampak bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan DIY lebih tinggi dibanding dengan di pedesaan Indonesia. Sementara itu pada periode tahun yang sama di perkotaan pola konsumsi makanan dan bukan makanan disajikan pada Tabel 5 berikut. Dari table 5 nampak bahwa pada periode tahun 2011 - 2020 pola konsumsi bahan makanan di DIY lebih kecil dibanding dengan pola konsumsi di perkotaan Indonesia. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan Indonesia. Pada periode tahun 2011 - 2020 tingkat kesejahteraan paling tinggi masyarakat perkotaan DIY terjadi pada tahun 2015 dengan pola konsumsi bahan pangan 35,57 persen dan bahan bukan pangan 64,43 persen. Sedangkan untuk perkotaan Indonesia pola konsumsi bahan makanan 47,47 persen dan konsumsi bukan makanan 52,53 persen.

Tabel 5. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia dan DIY di Perkotaan Untuk Makanan dan Non Makanan, 2011 - 2020.

No.	Tahun	Daerah Istimewa Yogyakarta		Indonesia	
		Makanan (%)	Bukan Makanan (%)	Makanan (%)	Bukan Makanan (%)
1	2011	43,11	56,89	49,45	50,55
2	2012	45,07	54,93	51,08	48,92
3	2013	42,98	57,02	50,66	49,34
4	2014	38,04	61,96	50,04	49,06
5	2015	35,57	64,43	47,47	52,53
6	2016	37,88	52,12	48,08	51,92
7	2017	40,25	59,75	50,94	49,06
8	2018	38,66	61,34	49,51	50,49
9	2019	38,65	61,35	49,14	50,86
10	2020	39,17	60,83	49,22	50,78

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Dari tabel 6 nampak bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan DIY lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pedesaan di Indonesia. Pada tahun 2021 konsumsi bahan makanan di DIY adalah 51,75 % dan bahan non makanan 48,25 %, sementara itu konsumsi bahan makanan untuk rata-rata di pedesaan Indonesia 56,20 % dan untuk rata-rata bahan non makanan di Indonesia 43,80 %. Selain itu, diantara sepuluh besar tersebut nampak bahwa propinsi Bali paling tinggi tingkat kesejahtraannya dengan konsumsi bahan makanan 49,53 % dan untuk konsumsi bahan bukan makanan 50,47 %. Sedangkan diantara sepuluh propinsi tersebut di atas yang paling rendah tingkat kesejahtraannya adalah propinsi Jawa Tengah, dengan konsumsi bahan makanan 53,13 % dan konsumsi bahan bukan makanan 46,87 %. Sementara itu untuk di daerah perkotaan sepuluh besar tingkat kesejahtraan menurut pola konsumsi bahan makanan dan bahan bukan makanan di Indonesia disajikan pada tabel 7.

Tabel 6. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia Untuk Makanan dan Non Makanan, di Perdesaan Propinsi Sepuluh (10) Besar Tahun 2021.

No.	Propinsi	Makanan	Bukan Makanan
1	Bali	49,53	50,47
2	Kalimantan Timur	49,59	50,41
3	Gorontalo	50,33	49,67
4	Sulawesi Tenggara	51,67	48,33
5	DIY	51,75	48,25
6	Maluku Utara	52,19	47,81
7	Sulawesi Tengah	52,32	47,68
8	Papua Barat	52,55	47,45
9	Kalimantan Utara	52,74	47,26
10	Jawa Tengah	53,13	46,87
	Indonesia	56,20	43,80

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Di DIY pada tahun 2021 di perkotaan tingkat kesejahteraannya nomor 2 setelah Jakarta, dengan pola konsumsi bahan pangan 40 persen dan bahan bukan pangan 60 persen, sementara di Jakarta pola konsumsi untuk bahan pangan 39,54 persen dan untuk bahan bukan pangan 60,46 persen. Sementara itu rata-rata di perkotaan Indonesia untuk pola konsumsi bahan pangan 45,81 persen dan pola konsumsi bukan makanan 54,19 persen.

Tabel 7. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia Untuk Makanan dan Non Makanan, di Perkotaan Propinsi Sepuluh (10) Besar Tahun 2021.

No.	Propinsi	Makanan	Bukan Makanan
1	Jakarta	39,54	60,46
2	DIY	40,00	60,00
3	Kalimantan Timur	40,61	59,39
4	Bali	40,93	59,07
5	Gorontalo	42,63	57,37
6	Sulawesi Tenggara	42,92	57,08
7	Sulawesi Tengah	43,09	56,91
8	Sulawesi Barat	43,98	56,02
9	Kepulauan Riau	44,11	55,89
10	Papua Barat	44,20	55,80
	Indonesia	45,81	54,19

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan propinsi dengan persentase pengeluaran untuk bahan makanan relatif rendah, yaitu sekitar 41 persen dari total pengeluaran, sebaliknya Papua, Aceh dan Nusa Tenggara Timur merupakan propinsi dengan persentase pengeluaran untuk makanan paling tinggi yaitu sekitar 57 persen (Anonim, 2023).

Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Sepuluh provinsi dengan urutan skor terbaik tahun 2021 adalah Bali (83,82), Jawa Tengah (82,73), DI Yogyakarta (81,43), Sulawesi Selatan (80,82), Gorontalo (80,52), Kalimantan Selatan (80,29), Jawa Timur (79,70), Sumatera Barat (79,55), Sulawesi Utara (78,30) dan DKI Jakarta (78,01). Sedangkan sepuluh provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (35,48), Papua Barat (46,05), Maluku (58,70), Maluku Utara (59,58), Kepulauan Riau (63,26), Nusa Tenggara Timur (67,35), Sumatera Selatan (69,55), Bengkulu (70,32) dan Kalimantan Barat (71,32) (Anonim, 2023).

4. KESIMPULAN

- Di Pedesaan, DIY tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional.
- Di Perkotaan, DIY tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional.
- Di Pedesaan pada tahun 2011 - 2020, tingkat kesejahteraan di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional.
- Di Perkotaan pada tahun 2011 - 2020, tingkat kesejahteraan di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional.
- Pada tahun 2021 di Pedesaan DIY, tingkat kesejahteraannya menduduki nomor lima Nasional.
- Pada tahun 2021 di Perkotaan DIY, tingkat kesejahteraannya menduduki nomor dua Nasional.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada LPPM Universitas Widyagama Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan tulisan di Jurnal PROSIDIA WIDYA SAINTEK, Alhamdulillah dapat membantu termuatnya makalah kami. Semoga dapat mendatangkan banyak manfaat kepada semua pihak, Aaamin.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS DIY (2020), Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- [2] Ida Bagus Eka Artika dan Ida Ayu Ketut Marini (2023), Implikasi Ekonomi Dari Pola Konsumsi Pangan Dan Non Pangan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2018 - 2022.
- [3] Program (2023), DIY Raih Penghargaan Terbaik 1 Kategori Provinsi Dengan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Nasional.
- [4] Lidya Anggalisa, Lidya dan Marwan (2023), Analisis Konsumsi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023
- [5] Achmad Dzaky Arrosyid 1 , Pandi Pardian 2 (2022), Analisis Perubahan Pola Konsumsi RumahTangga Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kel.Baru, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Volume 9, Nomor 2, Mei 2022 : 699-712.
- [6] Anonim (2023), Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2022. Volume 1 Tahun 2022. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2022. (20)
- [7] Dewi Mayasaria, Dias Satria dan Iswan Noora (2018), Analisis Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Status IPM di Jawa Timur The Pattern of Food Consumption Based on HDI in East Java. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. 18 No. 2 Januari 2018: 191-213.
- [8] Fourtheria Munidestari, Djaimi Bakce, Novian (2022), Analisis Pola Konsumsi Pangan Padi-Padian Dan Umbi-Umbian Rumah Tangga Di Provinsi Riau. Jurnal Agribisnis Vol: 24 No: 1 Juni 2022.
- [9] arhan Baihakki, Muhammad Anwar Fathoni (2023), Determinan Pola Konsumsi Rumah Tangga Masyarakat Muslim DKI Jakarta Tangga Masa Pandemi Covid-19. Islamic Economics and Business Review. (Volume 1, No. 2), Tahun 2022 | pp. 169-183
- [10] Selvi, Moh. Mudassir, Ali, dan Trisna (2023), Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Di Desa Marisa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian Vol. 5, No.1, Mei 2023.
- [11] Sri Handayani, Herry Yulistiyono (2023), Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Banyuwangi. Volume 12, No.1, Juni 2023.
- [12] Amalia Septiyani (2022), Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Palembang. Skripsi
- [13] Anonim (2023), Analisis Ketahanan Pangan Tahun 2022. Volume 1 Tahun 2022. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2022. Volume 1 Tahun 2022. Oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2022.